**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Aisyah, Nur. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Deepublish,

Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*, Bandung, Pustaka Setia,

Nurfurqon, Ardika. 2020 "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*,

Revida, Erika, 2020. et al. *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis,

Ridwan, Juniarso. Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia,

Sururi, Ahmad. 2016. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*,

Syafri, Wirman. 2012, *Studi Tentang Administrasipublik,* Jakarta: Erlangga,

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group.

Utama, Johan. 2004. *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*."

Wahab, Solichin Abdul. 2001. "Globalisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Governance." *Jurnal Administrasi Negara*,

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diluncurkan pada 8 Juli 2018 untuk mengatur sistem OSS.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 91 Pasal 11 Tahun 2017 Tentang PTSP.

PP No.24 Tahun 2018 dicabut, kemudian digantikan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

PP No.5/2021 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 BAB III Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.

Peraturan Ombudsman RI Pasal 11 Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/MENKES/328/2020 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003 Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Peraturan BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

**WEBSITE**

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-2020>

<http://blog.ub.ac.id/inihilmi/2020/02/25/jenis-dan-klasifikasi-pelayanan-publik/>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-jasa-atau-layanan/13933/2>

<https://www.coursehero.com/file/p5m5gfs/Barang-semi-privat-memiliki-karakteristik-nonrival-dan-dapat-dikecualikanBarang/>

<https://eng.unhas.ac.id/pwk/id/news/14-Barang-Publik-Perkotaan.html>

<https://www.materibelajar.id/2016/01/materi-pelayanan-publik-jenis-pelayanan.html>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya/baca-artikel/13208/Beradaptasi-dengan-Tatanan-Normal-Baru-New-Normal.html>

<https://www.alodokter.com/virus-corona>

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kaleidoskop-kebijakan-layanan-publik-semasa-pandemi-covid-19#:~:text=Kebijakan%2Dkebijakan%20tersebut%20antara%20lain,normal%20dengan%20menerapkan%20protokol%20kesehatan.

**JURNAL:**

Afdzal Muzakir,”Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Kantor Dinaspenanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram)”, Skripsi Jurusan Urusan Publik Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataramm, 2021.

Asri B.”Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid-19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat”. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020.

Taufik , Hardi Warsono” Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19”. Ilmu administrasi publik, 2020.

Oktafia Ika Handarini, Siti Sri Wulandari,” Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19”. Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2020.

Elok Nafilah , Sukaesih , Evi Nursanti Rukmana , Encang Saefudin,” Inovasi pelayanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama pandemi Covid-19”. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Padjadjaran, 2020.

Rusnadiah, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Deasy Sylvia Sari,” Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung”. Pascasarjana Kebijakan Publik, Fisip Unpad. 2021.